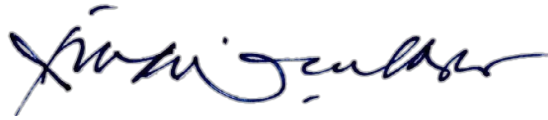


Tanda Tangan Peserta Ujian



**BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS
TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2023/2024 Genap (2024.1)**

Nama Mahasiswa : Rhiza S. Sadjad
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 045276176
Tanggal Lahir : 6 September 1957
Kode/Nama Mata Kuliah : ISIP4212/Pengantar Ilmu Politik
Kode/Nama Program Studi : 70/Sosiologi
Kode/Nama UT-Daerah : 80/Makassar
Hari/Tanggal UAS THE : Kamis, 4 Juli 2024

Petunjuk

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Surat Pernyataan
MahasiswaKejujuran
Akademik**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

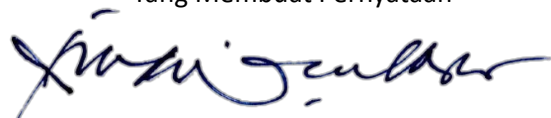
Nama : Rhiza S. Sadjad
MahasiswaNIM : 045276176
Kode/Nama Mata : ISIP4212/Pengantar Ilmu Politik
KuliahFakultas : FHISIP
Program Studi : S1 Sosiologi
UT-Daerah : Makassar

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujianUAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiarisi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Bogor, 4 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



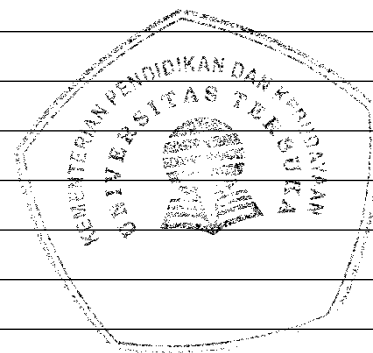
Rhiza S. Sadjad
Nama Mahasiswa

JAWABAN ADA PADA HALAMAN BERIKUTNYA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

JAWABAN ADA PADA HALAMAN BERIKUTNYA



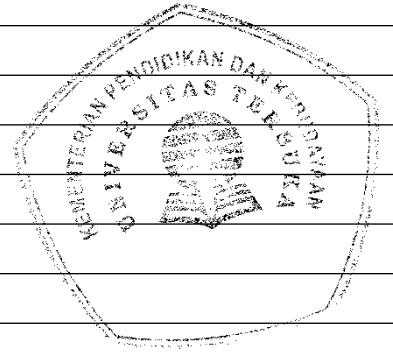
BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

JAWABAN ADA PADA HALAMAN BERIKUTNYA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

JAWABAN ADA PADA HALAMAN BERIKUTNYA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

UJIAN AKHIR SEMESTER-TAKE HOME EXAM (THE)
UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2023/2024 Genap (2024.1)
Pengantar Ilmu Politik ISIP4212

Nama : Rhiza S. Sadjad

NIM : 045276176

Pertanyaan 1 dari 4:

Dalam rentang waktu 31 Juli hingga 5 Agustus 2023, sekitar 1.000 warga Nagari Air Bangis dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatra Barat. Mereka menolak rencana PSN kilang minyak dan petrokimia dengan luas konsesi 30.000 hektar karena menyerobot lahan yang dikelola warga. Namun aksi protes itu ditanggapi secara represif dengan pengerahan kekuatan oleh aparat keamanan yang memulangkan secara paksa para pemrotes, disertai penangkapan atas 18 orang warga, mahasiswa, dan aktivis serta intimidasi dan kekerasan atas sedikitnya empat jurnalis peliput aksi.

(dikutip dari Amnesty Internasional

<https://www.amnesty.id/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/> 30 Oktober 2023)

Pertanyaan: Berdasarkan kasus diatas, jelaskan pasal dalam UUD 1945 yang menaungi hak asasi manusia sesuai artikel diatas dan jelaskan alasan Anda mengapa memilih pasal tersebut!

Jawaban 1 dari 4:

Pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan kasus di atas adalah Pasal 28 I UUD 1945 setelah amandemen ke-4. Dalam hal ini pengerahan kekuatan aparat untuk melakukan pemaksaan dengan tindakan represif, intimidasi dan kekerasan jelas-jelas melanggar bunyi pasal tersebut. Secara eksplisit pasal tersebut menetapkan bahwa setiap warganegara berhak untuk tidak mendapatkan siksaan dalam bentuk apa pun dari aparat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan hak warga-negara atas kemerdekaan berfikir sesuai hati nuraninya. Pasal 28 I tersebut terdiri dari 5 ayat, yang seluruhnya terkait dengan penegakan hak azasi manusia, serta tanggungjawab negara, khususnya pemerintah dalam hal ini. Pasal 28 I dilanjutkan dengan Pasal 28 J yang menegaskan bahwa setiap warga-negara, selain memiliki hak azasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara, juga ber-kewajiban untuk menghormati hak azasi yang dimiliki orang lain sesama warga-negara.

Jadi dalam kasus dalam artikel yang dikutip di atas, menurut Pasal 28 I dan 28 J UUD 1945 amandemen ke-4, baik aparat mau pun para demonstran, sama-sama memiliki hak azasi-nya masing-masing yang harus saling dihormati satu dengan yang lain.

Pertanyaan 2 dari 4:

Pada era demokrasi, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung sebanyak 4 kali sejak pemilu 2004 dengan sistem pemilihan langsung dimana rakyat secara langsung

memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung. Selain pemilihan umum, tingkat partisipasi rakyat dalam proses politik sangat tinggi dengan adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi dimana hal ini tidak diperoleh di jaman pemerintahan otoriter orde baru.

Pertanyaan:

Jika menggunakan kategori budaya politik Almond dan Powell, selama kurun waktu demokrasi sejak pemilu langsung 2004 hingga sekarang, maka jelaskan budaya politik yang paling dominan untuk menggambarkan situasi tersebut menurut budaya politik Almond dan Powell! Berikan contoh dari bentuk budaya politik tersebut di era demokrasi saat ini!

Jawaban 2 dari 4:

Menurut Almond dan Powell ada 3 (tiga) kategori budaya politik yaitu: (1) parokhial, (2) subyek dan (3) partisipan. Menurut hemat saya, budaya politik di Indonesia pada umumnya sejak dilaksanakannya Pilpres secara langsung berada dalam peralihan dari patokhial ke subyek atau partisipan, dengan beberapa pengecualian khususnya di kota-kota besar yang sudah memasuki budaya partisipan. Hal ini terkait erat dengan tingkat pendidikan dan kompetensi rata-rata pemilih yang masih rendah, serta pola sosialisasi politik yang bersifat “*top-down*”. Di kota-kota besar, seperti contohnya di DKI Jakarta, budaya politik masyarakat yang dominan adalah budaya partisipan. Warga Jakarta pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi bahwa mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pada setiap kesempatan, misalnya PEMILU, mereka dengan sadar secara aktif ber-partisipasi, karena mereka tahu partisipasi mereka akan berpengaruh pada sistem politik. Mereka juga menyadari bahwa kebijakan publik yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Pertanyaan 3 dari 4:

Baca artikel singkat dibawah ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, bubar sore ini. Lalu lintas di sekitarnya berangsur kembali normal, meskipun masih tampak tersendat karena masih ada beberapa buruh yang bertahan menyampaikan orasinya. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Senin (2/10/2023) pukul 18.00 WIB, massa demo buruh mulai membubarkan diri. Terpantau massa aksi buruh yang mulai membubarkan diri pertama kali adalah massa aksi dari serikat FSPMI dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nena Wea.

Demo ini sendiri menolak hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak catat hukum dan karenanya sah secara konstitusional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya telah melukai rasa keadilan bagi buruh. Andi Gani mengaku awalnya sangat yakin MK akan menerima gugatan konfederasi buruh namun nyatanya tidak sesuai harapan yang diinginkan."Saya yang memimpin langsung ribuan massa buruh di Patung Kuda meminta massa tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum walaupun putusan MK sangat menyakiti buruh," katanya. Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union

Council (ATUC) ini menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi untuk menyiapkan gugatan materiil terhadap UU Cipta Kerja.

Dikutip dari CNBC Indonesia

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20231002184931-4-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231002184931-4-477231/gugatan-uu-ciptaker-ditolak-pendemo-mulai-membubarkan-diri)

[477231/gugatan-uu-ciptaker-ditolak-pendemo-mulai-membubarkan-diri](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231002184931-4-477231/gugatan-uu-ciptaker-ditolak-pendemo-mulai-membubarkan-diri)

Berdasarkan artikel diatas, ada 2 pertanyaan yang diajukan:

a. Joan Nelson dalam bukunya No Easy Choice, membedakan tipe partisipasi politis yaitu partisipan yang otonom dan yang dimobilisasi. Setelah membaca artikel di atas, menurut Anda manakah yang terjadi di Indonesia saat itu?

b. Jelaskan alasan jawaban Anda pada poin a dan berikan contoh lain dari bentuk partisipasi tersebut minimal 3 , dan lengkapi argumen jawaban Anda dengan materi yang telah Anda pelajari pada BMP dan dengan sumber referensi lain merujuk pada jurnal ilmiah online yang relevan dan kredibel. Jangan lupa sertakan tautan (link) sumber rujukan online tersebut.

Jawaban 3 dari 4:

- a) Dalam kasus yang digambarkan di atas, tipe partisipasi politisnya adalah partisipasi yang dimobilisasi oleh organisasi serikat buruh.*
- b) Jelas dalam artikel di atas, digambarkan bahwa massa buruh yang berdemonstrasi dikerahkan (dimobilisasi) oleh serikat buruh, dalam hal ini organisasi FSPMI dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nena Wea. Contoh-contoh lain dari bentuk partisipasi politis dari tipe yang dimobilisasi, misalnya gerakan-gerakan masyarakat yang di-mobilisasi dan di-organisasi-kan oleh individual atau kelompok-kelompok tertentu, seperti: (1) Gerakan “Rock the Vote” di Amerika Serikat yang menganjurkan agar generasi muda menggunakan hak pilih-nya, (2) Semua bentuk demonstrasi protes yang ter-organisir adalah bentuk partisipasi politik yang di-mobilisasi, (3) Gerakan “212” di Jakarta, merupakan contoh bagaimana suatu gerakan masyarakat di-mobilisasi oleh berbagai organisasi Islam.*

Pertanyaan 4 dari 4:

Modifikasi dari teori Montesquieu dari pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan (check balances) dihasilkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan oleh salah satu badan. Pengawasan dan Keseimbangan (Checks and Balances) mengatur agar satu organ mengawasi dan mengimbangi yang lain. Pada tahun 2014 untuk pertama kali sejak Indonesia menjadi negara demokrasi, pemerintahan yang terbelah (divided government) terjadi, sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak dapat berjalan dengan baik selama satu tahun.

Jelaskan melalui penelusuran secara online terhadap kasus tersebut, mengapa divided government tersebut dapat terjadi? dan jelaskan apakah check and balances dapat diterapkan dalam kondisi divided government, jika tidak jelaskan mengapa! dan berikan contoh minimal satu dari kegagalan check and balances di negara lain yang menganut demokrasi

Jawaban 4 dari 4:

Pada Pilpres tahun 2014, terjadi polarisasi yang (mulai) menajam antara 2 (dua) kubu, yaitu kubu Paslon 01 dan Paslon 02. Polarisasi yang tajam tersebut terus berlanjut setelah Pilpres berlalu, bahkan sampai ke Pilpres pada periode berikutnya pada tahun 2019. Sistem politik Indonesia yang merupakan sistem presidensial dengan banyak partai, menyebabkan parlemen yang terlalu kuat, dan menempatkan presiden hanya sebagai “petugas partai”. DPR sebagai lembaga legislatif didominasi oleh anggota partai pemenang Pilleg, yang juga merupakan partai yang memberi “tugas” kepada Presiden terpilih. Sementara itu partai-partai yang tidak mendukung presiden terpilih berada di luar pemerintahan, dan bersikap oposisi, tapi tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan “*check and balances*” yang sehat, baik di DPR mau pun – apa lagi – di pemerintahan.

“*Divided government*” terjadi ketika partai-partai yang berbeda menguasai berbagai bagian yang berbeda di pemerintahan. Contohnya misalnya di Perancis pada periode tahun 1997 sampai 2002, President Jacques Chirac berasal dari partai yang ber-oposisi dengan partai-nya Perdana Menteri Lionel Jospin. Mereka terpaksa bekerja-sama dalam menjalankan pemerintahan, walau pun ideologi partainya berlawanan. Dengan sendirinya mekanisme “*checks and balances*” tidak bisa berjalan dengan baik.